

# Kontroversi Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal

*Atil Rinenggo\*<sup>1</sup>, Abdul Karim<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup>Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

*E-mail: \*<sup>1</sup>rinenggoalil@gmail.com, <sup>2</sup>karimungan@gmail.com*

## INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi:

26 Februari 2021

Diterbitkan *Online*:

29 April 2021

## KATA KUNCI

pendidikan  
kewarganegaraan,  
negara liberal

## Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, perilaku yang baik, serta keterampilan kewarganegaraan. Pada praktiknya, pendidikan kewarganegaraan di negara liberal menimbulkan kontroversi baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Tujuan penulisan yaitu untuk mengkaji pendidikan kewarganegaraan di negara liberal. Teknik pengumpulan data bersumber dari artikel jurnal yang ditulis oleh William A. Galston tentang pendidikan kewarganegaraan di negara liberal dan artikel lain untuk memperkuat hasil kajian. Kajian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di negara liberal memperoleh tanggapan yang negatif dari masyarakat. Mereka berasumsi dengan adanya pendidikan kewarganegaraan justru dapat mengancam hak-hak asasi individu, melanggar hati nurani dan konsepsi cara hidup yang berbeda antara individu ataupun masyarakat. Penulis sepakat dengan gagasan William A. Galston, untuk menyarankan perlu adanya pendidikan kewarganegaraan diterapkan di negara liberal untuk membangun pengetahuan kewarganegaraan, menanamkan nilai-nilai kebajikan, berpartisipasi aktif dalam ranah publik, tanpa mengurangi hak kebebasan individu

## Abstract

*Citizenship education has an important role in shaping smart citizens, good behavior, and civic skills. In practice, civic education in liberal countries creates controversy from both the public and the government. The purpose of writing is to examine citizenship education in liberal countries. The data collection techniques were sourced from journal articles written by William A. Galston about citizenship education in liberal countries and other articles to strengthen the results of the study. Studies show that citizenship education in liberal countries has received negative responses from the public. They assume that the existence of citizenship education can threaten individual human rights, violate consciences and the conceptions of different ways of life between individuals and society. The author agrees with William A. Galston's idea, to suggest that civic education should be applied in a liberal country to build citizenship knowledge, instill virtue values, participate actively in the public sphere, without*

## PENDAHULUAN

Konsep ideologi yang dibangun oleh setiap negara yang ada di belahan dunia memiliki landasan sejarah yang panjang sesuai dengan latar belakang dan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam masyarakat. Setiap negara memiliki cara berpikir yang tentu tidak sama dengan negara lain. Banyak ideologi besar yang ada di dunia, misalnya; ideologi agamis, komunis, liberalis, dan sosialis. Masing-masing ideologi tersebut memang tidak bisa dianggap baik atau buruk karena setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasib dan tujuan negara yang ingin dicapai dengan sudut pandang yang berbeda.

Sebagian besar negara-negara di dunia memiliki pemikiran mengenai konsep demokrasi sebagai penjamin hak dan kebebasan yang lahir secara alamiah. Negara hadir untuk melindungi dan mengayomi kepentingan masyarakat dari ketertiban, kesejahteraan serta keamanan di masyarakat. Hak untuk hidup, hak berpendapat, berekspresi, berpartisipasi aktif dalam ranah publik, perlakuan adil dihadapan hukum, dll., merupakan hak-hak yang harus dihargai dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Negara menjamin hak-hak warga negara dengan cara proses demokrasi melalui kesepakatan yang dibangun antara masyarakat dan pemerintah dengan cara yang sah. Dengan demikian, pemerintah suatu negara memiliki legitimasi yang kuat untuk membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umum di negara yang bersangkutan.

Dalam model rasionalitas, pendidikan dipandang sebagai intrinsik politik, yang dirancang untuk mendidik warga negara untuk berpartisipasi cerdas dan aktif dalam komunitas sipil. Dengan demikian, pendidikan tidak dimaksudkan untuk melatih. Tujuannya yaitu untuk pembentukan karakter yang saleh dalam upaya berkelanjutan untuk kebebasan. Pendidikan lebih diposisikan sebagai kontrol sosial pada individu. Pendidikan juga diposisikan untuk mengajarkan menghormati terhadap suatu otoritas yang membentuk perilaku yang baik. Sekolah lebih bernuansa politik tertentu. Namun, pada Abad 20-an, mengalami pergeseran filosofis. Sekolah tidak lagi menjadi alat politik dan politik dihapuskan dari lingkungan sekolah karena pertimbangan prinsip rasionalitas. Pendidikan kewarganegaraan menjadi terjalin dalam budaya positivisme (Giroux, 2014: 2-3).

Pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di seluruh dunia tidak semestinya berhasil dan diterima oleh masyarakat di suatu negara. Galston (2004: 264) menjelaskan bahwa kegagalan pendidikan kewarganegaraan di negara liberal (Amerika) disebabkan karena sebagian besar negara bagian yang mendukung pendidikan kewarganegaraan dalam konstitusi dan kebijakan deklarasi mereka, hanya setengahnya bahkan telah secara spesifik menetapkan inti pengetahuan kewarganegaraan yang diperlukan, lebih sedikit yang melakukan upaya serius untuk menyelaraskan kursus terkait kewarganegaraan mereka dengan standar yang menantang, dan hanya beberapa ujian yang berfokus pada topik-topik kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah hanya terdiri dari satu kursus pemerintah saja, dibandingkan dengan tiga kursus dalam kewarganegaraan, demokrasi, dan pemerintahan yang umum sampai tahun 1960-an. Berbeda dengan kursus kewarganegaraan tradisional, kelas pemerintah saat ini menganalisis dan menggambarkan politik sebagai subjek yang jauh, seringkali dengan sedikit diskusi eksplisit tentang hak dan tanggung jawab warga negara. Banyak guru, kepala sekolah, dan dewan sekolah takut dikritik atau bahkan diadili jika mereka membahas topik-topik yang mungkin dianggap oleh orang tua atau anggota masyarakat

lainnya kontroversial atau politis. Sebagai tanggapan, banyak sistem sekolah yang jauh dari pendidikan kewarganegaraan.

Di negara liberal, sebagian warga negara masih menganggap bahwa partisipasi politik bukanlah sesuatu yang penting, sehingga dalam praktiknya seringkali abstain atau golput pada proses pemilihan umum. Di negara demokrasi, hak untuk memilih memang menjadi hak bagi setiap individu, tetapi hak memilih merupakan bagian dari partisipasi politik yang dapat membangun praktik pemerintahan yang lebih demokratis. Melalui pendidikan kewarganegaraan, sebaiknya perlu mengembangkan ciri-ciri yang bisa dipergunakan untuk berfikir kritis dan mengevaluasi pemerintahan dengan membandingkan dengan pemerintahan yang lain di dunia atau tidak berfungsi dengan baik sebagai demokrasi (Bachmueller & Patrick. 1999: 10).

Gutmann berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan yang didefinisikan oleh liberalisme politik atau liberalisme komprehensif tidak mengakomodasi keragaman sosial yang sejati. Kewarganegaraan demokratis dalam masyarakat liberal dibutuhkan, sampai batas tertentu, pengajaran kebajikan dan keterampilan individualitas dan otonomi, yang menurut Gutmann (1995) mengarah pada konvergensi liberalisme politik dan liberalisme komprehensif (Celik, 2016: 3). Hubungan antara demokrasi liberal dan pendidikan kewarganegaraan (atau pendidikan kewarganegaraan yang lebih formal dan secara politik lebih ambisius) tampaknya cukup jelas. Sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial yang mendesak, perubahan sipil yang muncul dalam studi kewarganegaraan dan migrasi jelas didorong oleh anggapan bahwa pendidikan dapat memberikan banyak manfaat bagi negara dan populasi demokrasi liberal dengan mengajari orang cara berpikir dan bertindak secara tepat tentang kohabitasi, interaksi, dan integrasi (Strandbrink, 2017: 35). Campbell, et al., menjelaskan bahwa tren yang mengganggu politik Amerika, meliputi: menurunnya keterlibatan sipil, terutama di kalangan anak muda, polarisasi politik yang meningkat, semakin tidak menyenangkan, dan menurunnya kepercayaan pada pemerintah (Gainous & Martens, 2016: 1).

Kesadaran politik akan terwujud dengan baik jika seluruh masyarakat mau belajar mengenai nilai-nilai demokrasi yang diilhami bersama untuk mencapai kepentingan negara. Warga negara harus memiliki kecerdasan berpikir, watak kepribadian yang baik, serta keterampilan kewarganegaraan dalam membangun sebuah negara yang demokratis. Beberapa aspek tersebut penting dimiliki karena dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara timbul masalah-masalah atau gejala yang justru merugikan masyarakat atau kepentingan umum yang dilakukan oleh penguasa. Cara berpikir warga negara yang matang dan mampu bersikap dengan baik dapat mengontrol praktik pemerintahan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah justru bisa menimbulkan kontroversi atau konflik.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pendidikan kewarganegaraan di negara liberal. Manfaat teoretis dari kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan di negara liberal yaitu memberikan pandangan baru kepada akademisi dan praktisi di bidang pendidikan kewarganegaraan sebagai pelengkap atau pembanding konsep atau teori terkait pendidikan kewarganegaraan.

## METODE

Metode penulisan ini menggunakan metode *library research*. Metode ini digunakan untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. Selanjutnya, Zed (2004:54) menjelaskan bahwa riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan atau data melalui artikel jurnal, buku atau *handbook* yang relevan kemudian diolah/ digeneralisasi dan dikaji untuk memperkuat gagasan dari William Galston mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontroversi Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal

Di sebagian besar wilayah di suatu negara, kebutuhan dan kesesuaian pendidikan kewarganegaraan telah diterima tanpa mempertanyakannya. Adanya anggapan bahwa kaum muda harus dibentuk menjadi warga negara dan bahwa lembaga-lembaga publik memiliki hak dan tanggung jawab untuk memimpin mereka dalam membentuk warga negara yang demokratis. Namun, di Amerika Serikat selama beberapa generasi terakhir, pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat kontroversial. Beberapa percaya bahwa pengaturan politik dan sosial dapat berfungsi dengan baik tanpa pendidikan masyarakat yang ditentukan (atau diarahkan) publik. Yang lain meragukan bahwa salah satu spesifikasi pendidikan kewarganegaraan dapat dirancang untuk pemerintahan liberal yang mana individu, keluarga, dan masyarakat merangkul konsepsi hidup yang berbeda secara fundamental yang berbeda. Yang lain lagi berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan apapun harus melanggar otonomi dan hati nurani banyak individu dan kelompok dalam masyarakat yang beragam (Arthur & Davies, 2008: 98).

Galston menganggap bahwa pandangan tersebut amatlah keliru. Menurutnya, sangat penting dan mungkin untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan di negara liberal. Pendidikan kewarganegaraan berbeda dari pendidikan filosofis dalam semua hal ini. Tujuannya bukan untuk mengejar dan memperoleh kebenaran, melainkan pembentukan individu yang secara efektif dapat menjalankan kehidupan mereka di dalam, dan mendukung, komunitas politik mereka. Setidaknya kegiatan mencari kebenaran akan sepenuhnya konsisten dengan tujuan ini. Pendidikan kewarganegaraan juga tidak homogen dan universal. Ini adalah pendidikan definisi di dalam, dan atas nama, tatanan politik tertentu. Oleh karena itu, perilaku dan isi pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi liberal berbeda secara signifikan dari yang ada di negara-negara lain. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan juga tidak menentang komunitas politiknya. Sebaliknya, ia gagal pada dasarnya jika tidak mendukung dan memperkuat komunitas itu.

Pada tingkat teori, liberalisme berpihak pada serangkaian perselisihan tentang arti kesetaraan, kebebasan, dan pertikaian baik manusia yang tidak dapat dianggap diselesaikan secara definitif dari sudut pandang filosofis. Pada tataran praktis, beberapa individu akan datang untuk merangkul komitmen inti masyarakat liberal melalui proses penyelidikan rasional. Jika anak-anak harus dibawa untuk menerima komitmen ini sebagai sah dan mengikat, metode ini harus menjadi pedagogi yang jauh lebih retorik daripada rasional. Sebagai contoh, penelitian sejarah yang ketat hampir pasti akan membenarkan akun "revisionis" yang kompleks dari tokoh-tokoh kunci dalam sejarah Amerika. Pendidikan kewarganegaraan, bagaimanapun tetap membutuhkan sejarah yang lebih mulia dan bermoralisasi: jajaran pahlawan yang memberikan legitimasi pada lembaga-lembaga pusat dan layak ditiru. Tidak realistis untuk percaya bahwa lebih dari beberapa warga dewasa masyarakat liberal akan pernah bergerak melampaui komitmen sipil yang ditimbulkan oleh pedagogi semacam itu (Arthur & Davies, 2008: 99-100).

---

### **Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan**

Penyelidikan historis ke dalam pendidikan publik Amerika telah mendokumentasikan peran penggerak yang dimainkan oleh kebutuhan yang dirasakan akan pedagogi sipil yang dapat mengubah imigran menjadi warga negara. Kelompok-kelompok di seluruh spektrum politik telah menekankan kembali keyakinan mereka bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diperbarui merupakan kebutuhan mendesak: kelangsungan hidup demokrasi tergantung pada transmisi ke setiap generasi baru, visi politik kebebasan dan kesetaraan yang menyatukan orang Amerika. Nilai-nilai semacam itu tidak mengungkapkan kebenaran. Pengabdian kepada martabat manusia dan kebebasan, persamaan hak, keadilan sosial dan ekonomi, aturan hukum, sivilitas dan kebenaran, toleransi terhadap keberagaman, bantuan timbal balik, tanggung jawab pribadi dan kewarganegaraan, pengendalian diri dan pengendalian diri hormat-semua ini harus diajarkan dan dipelajari.

Beberapa sifat individu khusus untuk masyarakat liberal yaitu kemandirian, toleransi, dan rasa hormat terhadap keunggulan dan prestasi individu, misalnya. Yang lain lagi diharuskan oleh ciri-ciri utama politik demokrasi liberal. Bagi warga negara, disposisi untuk menghormati hak orang lain, kapasitas untuk mengevaluasi bakat, karakter, dan kinerja batasan publik sangat penting. Bagi para pemimpin, kesabaran untuk bekerja dalam keragaman sosial dan kemampuan untuk mempersempit kesenjangan antara kebijakan yang bijak dan persetujuan rakyat merupakan hal yang mendasar (Arthur & Davies, 2008: 100-101).

Dalam demokrasi liberal, kepedulian terhadap hak-hak individu dan untuk apa yang kadang-kadang disebut "ruang privat" mensyaratkan batasan pada kekuatan sah mayoritas, dan ini menunjukkan bahwa menumbuhkan watak untuk menghormati hak dan privasi adalah satu tujuan penting dari pendidikan kewarganegaraan liberal-demokratis. Pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan lembaga-lembaga semacam itu menekankan kebajikan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memilih perwakilan dengan bijaksana, untuk berhubungan dengan mereka secara tepat, dan untuk mengevaluasi kinerja mereka di kantor secara adil. Karakteristik ini dalam beberapa hal cukup berbeda dari sifat-sifat yang diperlukan untuk partisipasi langsung dalam urusan politik. Pedagogi kewarganegaraan dapat memasukkan kebajikan partisipatif. Bahkan mungkin mengakomodasi politik yang lebih ramah untuk berpartisipasi daripada praktik saat ini. Tetapi tidak bebas untuk memberikan kebajikan partisipatif sebagai kebanggaan tempat atau untuk tetap diam tentang kebajikan yang sesuai dengan lembaga perwakilan. Pendidikan kewarganegaraan demokratis yang liberal harus bertujuan untuk menghasilkan tidak hanya serangkaian keunggulan publik tetapi juga penerimaan seluas mungkin dari kebutuhan akan keunggulan seperti itu dalam pelaksanaan kehidupan publik (Arthur & Davies, 2008:102-103).

Galston (2004: 264-265) menyebutkan beberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara, meliputi: (a) pengetahuan sipil mempromosikan dukungan untuk nilai-nilai demokrasi. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki tentang kerja pemerintah, semakin besar kemungkinan untuk mendukung nilai-nilai inti dari pemerintahan sendiri yang demokratis, dimulai dengan toleransi; (b) pengetahuan sipil mempromosikan partisipasi politik. Semua hal lain dianggap sama, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki orang, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam urusan sipil dan politik; (c) pengetahuan sipil membantu warga negara memahami kepentingan mereka sebagai individu dan sebagai anggota kelompok; (d) pengetahuan sipil membantu warga belajar lebih banyak tentang urusan sipil; (e) semakin banyak pengetahuan yang dimiliki tentang urusan kemasyarakatan, semakin

sedikit memiliki ketidakpercayaan yang umum dan ketakutan terhadap kehidupan publik; (f) pengetahuan sipil meningkatkan konsistensi pandangan warga negara seperti yang diungkapkan dalam survei opini publik. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki orang, semakin konsisten pandangan mereka terhadap berbagai masalah dan dari waktu ke waktu; (g) pengetahuan sipil dapat mengubah pendapat kami tentang masalah sipil tertentu. Misalnya, semakin banyak pengetahuan sipil yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan mereka untuk takut akan imigran baru dan dampaknya terhadap negara.

Pendapat Galston diperkuat oleh Murray and Dirk (2012: 15) bahwa pendidikan kewarganegaraan mencerminkan aspek penting yang dikembangkan melalui sekolah. Sekolah sedang efektif dan meningkatkan kinerja berkenaan dengan prestasi murid tidak bisa mengabaikan masalah kualitas pribadi dan demokratisnya. Sekolah muncul untuk tidak lagi menjadi jumlah pencapaian siswa dalam setiap mata pelajaran, melainkan sebagai sebuah institusi yang harus menyampaikan keterampilan dan kebajikan hidup di dunia yang kompleks dan global masyarakat. Ini adalah suatu keharusan untuk menawarkan semua siswa perspektif kehidupan di negara maju masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Dengan demikian, sekolah wajib memberi setiap pelajaran peluang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dalam hal ini, keadilan pendidikan adalah dukungan aktif dari pengembangan kinerja siswa yang hanya dapat dicapai melalui pembelajaran yang berbeda dan individual dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling tergantung (NCSS, 1992). Atau, seperti Joseph Adelson (1971) mengutarakan dalam penelitiannya bahwa perkembangan identitas politik sebagai proses berjuang untuk merumuskan pandangan yang koheren secara moral tentang bagaimana masyarakat dan mungkin dan harus diatur. Mengejar dua tugas utama, yaitu pertama, sampai menunjukkan berbagai perspektif politik, karena tidak ada tujuan, kesamaan yang dimiliki bersama barang publik, khususnya dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan sub-budaya. Kedua, untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai, prinsip, dan prosedur demokratis adalah yang paling terkenal cara politik untuk mengatasi, menegosiasikan dan mengoordinasikan keragaman ideologis tanpa berperang (Murray & Dirk, 2013: 79).

Upaya untuk pendidikan kewarganegaraan tidak jauh dari rasisme, seksisme, homofobia, classisme (dan daftar berlanjut) tercermin dalam masyarakat. Kegagalan untuk mengakui cita-cita keadilan dan kesetaraan untuk semua tidak dapat dicapai tanpa perubahan mendasar untuk keadilan sosial tidak dipertimbangkan. Kegagalan untuk mengenali bahwa pengaruh historis rasisme endemik di Amerika dan sisa-sisa itu secara global dari perspektif pendidikan kewarganegaraan tidak bertanggung jawab. Untuk itu, pendidik dan peneliti sipil harus terlibat dalam eksplorasi yang lebih dalam hubungan menjadi warga negara yang efektif, keadilan sosial dan ras. Pengembangan pedagogi kritis untuk praksis kelas terus menjadi misi yang berharga untuk pendidikan. Proyek moral adalah konstruksi sosial dari dunia yang adil secara sosial. Pendidikan kewarganegaraan dengan pandangan untuk membantu mengungkap dan menghadapi ketidakkonsistenan antara cita-cita kesetaraan dan pluralisme, dan pengalaman hidup banyak warganya. Perubahan sangat penting jika Amerika akan memenuhi janjinya bagi semua warga negaranya, janji impian Amerika yaitu kebebasan. Perubahan dapat difasilitasi melalui model pendidikan kewarganegaraan (Arthur & Davies, 2008: 17).

---

### **Hambatan Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal**

Galston menyebut bahwa pendidikan kewarganegaraan menimbulkan kesulitan khusus bagi demokrasi liberal. Sebagian besar bentuk pemerintahan, klasik dan kontemporer, diam-diam telah memeluk pemahaman Aristoteles tentang politik sebagai asosiasi manusia arsitektonis di mana semua yang lain: keluarga, suku, pengelompokan ekonomi, bahkan agama disubordinasikan dengan benar. Untuk semua komunitas politik seperti itu, otoritas pemerintah untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan tidak perlu dipertanyakan lagi, karena konflik antara komitmen politik dan subpolitik diselesaikan dengan keyakinan bahwa politik menikmati keunggulan yang berprinsip. Sebaliknya, dalam masyarakat liberal, penyelesaian konflik semacam itu jauh lebih tidak jelas. Keberatan terhadap otoritas publik atas nama otonomi individu, hak orang tua, dan hati nurani religius sering terjadi dan dihormati. Tradisi liberal digerakkan oleh upaya untuk mengukir bidang yang secara substansial kebal terhadap pemerintah. Upaya yang digerakkan oleh pelajaran sejarah bahwa upaya untuk memaksakan keseragaman agama melalui perintah publik merusak ketertiban sipil serta hati nurani individu (Rorty, 1998: 472).

Tradisi liberal sensitif terhadap klaim hati nurani individu, para teoritis liberal awal sama-sama sadar akan bahaya dan batasan klaim tersebut. John Locke, misalnya, menolak untuk memperluas doktrin toleransi beragama menjadi bidang hati nurani pribadi yang tidak dapat diganggu gugat. Memang, ia bersikeras bahwa dalam kasus konflik, otoritas sipil lebih diutamakan daripada hati nurani atau iman. Kriteria utama adalah pemeliharaan ketertiban sipil. Pendapat yang mengancam perdamaian masyarakat mungkin ditentang secara sah atau bahkan ditekan.

Dalam perumusan klasik Amerika, pemerintah dilembagakan untuk mengamankan hak-hak ini. Ini berarti individu harus rela menyerahkan bagian apapun dari hak-hak ini yang harus dikorbankan untuk persyaratan ketertiban umum dan pelembagaan kelembagaan. Bahkan jika dimulai dengan konsepsi yang kuat tentang hak-hak individu yang didefinisikan secara teoretis dari pada secara historis atau politis, dipaksa untuk menyimpulkan bahwa otoritas publik dapat secara sah membatasi hak-hak tersebut atas nama memaksimalkan pelaksanaan efektif mereka. Secara khusus, pemerintah dapat mengajarkan keyakinan dan kebiasaan yang diperlukan untuk mendukung lembaga-lembaga yang menjamin hak-hak liberal, dan warga negara-negara liberal yang menentang pendidikan kewarganegaraan ini akan secara kontradiksi bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri, dipahami dengan benar.

Masalah paling pedih yang diajukan oleh pendidikan kewarganegaraan liberal yaitu bentrokan antara isi pendidikan itu dan keinginan orang tua untuk meneruskan cara hidup mereka kepada anak-anak mereka. Prinsip yang sama yang mengharuskan negara untuk memberikan kebebasan pribadi dan politik bagi orang dewasa juga berkomitmen untuk meyakinkan anak-anak pendidikan yang membuat kebebasan itu mungkin dan bermakna di masa depan. Suatu negara membuat pilihan menjadi mungkin dengan mengajar warga negaranya di masa depan untuk menghargai sudut pandang yang berlawanan dan cara hidup. Hal itu membuat pilihan menjadi bermakna dengan membekali anak-anak dengan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk mengevaluasi cara hidup yang berbeda dari orang tua mereka.

Dalam pemerintahan liberal-demokratik, fakta keanekaragaman sosial berarti bahwa kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan cara hidup yang sangat berbeda dari kehidupan sendiri sangat penting. Lebih jauh, perlunya evaluasi publik terhadap para pemimpin dan kebijakan berarti bahwa negara memiliki minat dalam mengembangkan warga negara dengan setidaknya kondisi minimal penilaian

publik yang masuk akal. Tetapi tak satu pun dari persyaratan sipil ini mensyaratkan perlunya otoritas publik untuk menaruh minat pada bagaimana anak-anak berpikir tentang cara hidup yang berbeda.

Sudut pandang kewarganegaraan tidak menjamin kesimpulan bahwa negara harus (atau mungkin) menyusun pendidikan publik untuk mendorong refleksi skeptis anak-anak tentang cara hidup yang diwarisi dari orang tua atau komunitas lokal. Galston berpendapat bahwa dalam praktiknya, saat ini ada persepsi yang tersebar luas bahwa sistem pendidikan publik sudah mewujudkan bias terhadap otoritas dan kepercayaan. Persepsi ini, sebagian besar, adalah yang mendasari kontroversi tentang "humanisme sekuler" yang begitu tidak dapat dipahami oleh elit liberal (Arthur and Davies, 2008: 103-106).

### **Peran Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal**

Pendidikan kewarganegaraan menjadi sulit dan kontroversi dari sudut pandang manapun karena ideologi liberal ditentukan oleh penentangannya terhadap "manajemen mikro" individu. Liberalisme digerakkan oleh keyakinan bahwa individu mampu mengetahui dan memutuskan sendiri apakah hidup yang baik dan bermakna itu. Kualitas dan hak pribadi yang membantu membangun kehidupan semacam itu bersifat pribadi dan oleh karena itu harus berada di luar kewenangan negara atau otoritas lainnya. Untuk menghindari, atau setidaknya mengurangi, benturan antara moralitas pribadi individu dan moralitas publik dari warga negara, yang terakhir harus dirumuskan senetral dan seminimal mungkin (Fernandez & Sundstrom, 2011: 364). Steutel & Spiecker menjelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi liberal yaitu pertama menanamkan kebajikan moral yang khas seperti toleransi, non-diskriminasi dan sikap demokratis di satu sisi, dan mendorong kebajikan intelektual, yang merupakan konstitutif menjadi seorang warga kritis. Namun, sejauh figur kebajikan ini sebagai tujuan pendidikan kewarganegaraan, mereka harus dianggap sebagai kualitas politik. Kedua jenis tujuan tersebut dipilih dan dibenarkan dengan mengklaim hubungan kebutuhan fungsional antara pengejaran tujuan ini dan demokrasi liberal yang berkembang (Ruyter & Miedema, 2011: 202-203).

Ada tiga pihak dalam transaksi pendidikan, meliputi; anak-anak, orang tua mereka, dan negara. Mungkin negara tidak memiliki hak langsung untuk membentuk pendidikan publik sesuai dengan norma-norma pemeriksaan diri Sokrates. Kebebasan liberal berarti bahwa anak-anak memiliki hak kebebasan untuk tidak terpengaruh oleh cara hidup lingkungan masyarakat yang lebih baik. Jika orang tua menggagalkan hak ini dengan mencoba (seperti beberapa orang akan katakan) untuk "mencuci otak" anak-anak mereka, seharusnya negara memiliki hak dan kewajiban untuk turun tangan.

Anak-anak memiliki berbagai macam hak yang harus dihormati oleh orang tua dan bahwa pemerintah terikat untuk menegakkan terhadap pelanggaran orang tua. Orang tua mungkin tidak benar menghambat perkembangan fisik, intelektual, dan emosional normal anak-anak mereka. Mereka juga tidak dapat menghalangi perolehan kompetensi dan loyalitas sipil. Negara dapat bertindak dalam *loco parentis* untuk mengatasi hambatan berbasis keluarga untuk perkembangan normal. Hal itu dapat menggunakan perangkat publik, termasuk sistem pendidikan, untuk mempromosikan pencapaian oleh semua anak dari persyaratan dasar kewarganegaraan. Ini merupakan kekuatan negara intrusi yang sah. Tetapi mereka dibatasi oleh logika batin mereka sendiri. Di negara liberal, intervensi yang tidak bisa dibenarkan atas dasar ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Begitulah demokrasi liberal harus menarik garis batas antara otoritas orang tua dan publik atas pendidikan anak-anak, atau (dengan kata lain tidak terlalu bertentangan) yang merupakan prinsip yang menjadi dasar pembagian otoritas tersebut.



Terlepas dari pluralisme masyarakat liberal, sangat mungkin untuk mengidentifikasi inti dari komitmen dan kompetensi sipil yang diterima secara luas yang mendasari pemerintahan liberal yang tertata dengan baik. Negara memiliki hak untuk memastikan bahwa inti ini secara umum dan efektif disebarluaskan, baik secara langsung, melalui pendidikan kewarganegaraan publik, atau secara tidak langsung, melalui regulasi pendidikan swasta. Dalam kasus konflik, inti kewarganegaraan ini diprioritaskan daripada komitmen individu atau kelompok (bahkan tuntutan hati nurani), dan negara dapat secara sah menggunakan mekanisme paksaan untuk menegakkan prioritas ini. Tetapi negara liberal tidak harus berani melampaui hal ini. Ia tidak boleh membuang bobotnya di belakang cita-cita keunggulan pribadi di luar pemahaman bersama tentang keunggulan sipil, dan ia tidak boleh memberikan kebanggaan tempat pada pemahaman tentang kebebasan pribadi di luar pemahaman bersama tentang kebebasan sipil. Karena jika itu terjadi, negara liberal akan menentukan sebagaimana sah untuk, dan mengikat, semua satu konsepsi yang dapat diperdebatkan tentang bagaimana manusia harus menjalani hidup mereka. Atas nama liberalisme, ia akan mengkhianati prinsip-prinsip terdalam dan paling dapat dipertahankannya sendiri (Arthur & Davies, 2008: 107-108).

## **Pembahasan**

### **Pendidikan Kewarganegaraan di Negara Liberal**

Galston berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diterapkan di negara liberal. Masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa anak-anak mereka perlu memiliki kebebasan untuk tidak selalu mencari kebenaran dalam konsep pendidikan pedagogis semata tetapi juga perlu mempelajari nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai kebajikan tersebut antara lain; toleransi antar keberagaman, kemandirian, menghormati hak orang lain, dapat berpartisipasi aktif dalam ranah publik, dll. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan oleh pemerintah melalui lembaga sekolah diharapkan warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, mengetahui nilai-nilai demokratis, urusan kemasyarakatan, mengevaluasi kinerja institusi pemerintahan.

Pendapat Galston tersebut juga diperkuat oleh Giroux (2014: 23) bahwa selain berkomitmen membangun masyarakat yang lebih baik, langkah berikutnya dalam mengembangkan gagasan pendidikan kewarganegaraan yang fokus pada sekolah-sekolah perlu dipersiapkan kemampuan guru dan tenaga pendidik. Artinya guru sudah memiliki bekal tentang pendidikan kewarganegaraan, untuk membantu menemukan pemahaman siswa. Guru perlu terlibat dalam proses pendidikan, berpikir kritis, agar siswa mendapat pengalaman yang diperlukan. Oleh karena itu, guru perlu membangun pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman dalam konteks yang lebih luas sehingga materi yang diberikan dapat dipahami.

Giroux menjelaskan bahwa mode emansipatoris pendidikan kewarganegaraan, perlu dikembangkan sebagai berikut: Pertama, sifat aktif partisipasi siswa dalam proses pembelajaran harus ditekankan. Kedua, siswa harus diajarkan untuk berpikir kritis. Ketiga, pengembangan modus kritis penalaran harus digunakan sehingga memungkinkan siswa untuk tepat sejarah mereka sendiri, yaitu, untuk menyelidiki biografi mereka sendiri dan sistem makna. Keempat, siswa harus belajar tidak hanya bagaimana untuk memperjelas nilai-nilai, mereka harus juga mempelajari mengapa nilai-nilai tertentu yang diperlukan untuk reproduksi kehidupan manusia. Kelima, siswa harus belajar tentang kekuatan struktural dan ideologis yang mempengaruhi dan membatasi kehidupan mereka (Giroux, 2014: 31-32).

Tidak jauh berbeda dengan Berge (2006: 535-537) memfokuskan pembahasannya tentang pendidikan kewarganegaraan di Eropa pasca-komunis yang diperkuat analisisnya dengan paradigma dari data yang diperoleh dari IEA. Pada ranah persekolahan, pendidikan demokrasi diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan lebih memfokuskan pada penanaman seperti pengetahuan, pemahaman, sikap demokratis. Misalnya, tema yang diajarkan pada generasi muda berkisar pada mempersiapkan siswa dapat berpartisipasi dalam pemilihan kompetitif atau membaca dan memahami pemberitaan di koran, dll. Berge memandang bahwa generasi muda memiliki kemampuan yang masih perlu diasah untuk menjadikan warga negara seperti yang dicita-citakan. Dengan demikian, pengetahuan, pemahaman, dan melatih untuk bersikap demokratis menjadi fokus utama. Pendidikan kewarganegaraan lebih diarahkan pada penanaman dan menyerap partisipasi sosial, keterlibatan siswa aktif, dan etika yang baik. Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mengenai batasan mana yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Dania (2015: 48-50) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Nigeria, merupakan dimensi kolaboratif studi pendidikan sosial dalam pencapaian etika politik di Nigeria. Hal ini dilakukan dalam pencapaian etika politik. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan ilmu sosial diarahkan menuju satu tujuan pencapaian etika politik yang merupakan salah satu pendekatan multi-disiplin dan harus digunakan sebagai metode pelaksanaan studi sosial. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan ilmu sosial dalam hal ini berarti bahwa keduanya menanamkan dan menyerap partisipasi sosial, keterlibatan siswa aktif dan etika yang baik. Pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada pembentukan warga negara yang baik. Selain itu, nilai-nilai keterampilan, dimensi global yang terkait dengan pencapaian etika politik menjadi konten materi pendidikan kewarganegaraan. Etika yang diajarkan didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bertindak sebagai panduan untuk berperilaku, tindakan, dan pilihan. Etika yang dibangun atas tanggung jawab, sebagai individu, organisasi dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Pendidikan kewarganegaraan di sini juga mengajarkan mengenai batasan mana yang hak dan mana yang kewajiban. Pendidikan lebih mengangkat sisi manusiawi yang mencakup kebajikan, kejujuran, kasih sayang, dan kesetiaan. Pendidikan kewarganegaraan juga mempromosikan mengenai partisipasi dalam pengambilan keputusan, penempatan hubungan masyarakat, kepekaan terhadap nilai-nilai dan etika serta keterlibatan dalam pembahasan isu-isu penting seperti voting dan perdebatan. Pendidikan kewarganegaraan mengembangkan keterampilan individu, sikap, dan nilai-nilai yang akan memungkinkan untuk menunjukkan keprihatinan terhadap kesejahteraan dan martabat orang lain, menghormati nilai orang lain dan mendekati keputusan sipil dengan cara yang rasional.

Borhaug, (2010: 66-67) menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan di negara Norwegia. Pendidikan kewarganegaraan di Norwegia sudah dikembangkan selama hampir 200 tahun. Hingga perang dunia ke-II, konten utama difokuskan pada konstitusi dan struktur formal lembaga-lembaga politik negara. Orientasinya pada partisipasi politik yang lebih besar dan cita-cita demokrasi. Konten konstitusi yang diberikan dalam pembelajaran yaitu konstitusi Norwegia pada tahun 1814, yang mewajibkan bagi semua anak muda Norwegia untuk belajar konstitusi. Pada abad ke-19 dan ke-20, pendidikan kewarganegaraan secara bertahap dikembangkan dalam sistem pendidikan Norwegia. Pendidikan kewarganegaraan difokuskan pada hal-hal yang konstitusional dan struktur formal lembaga pemerintah. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga dijadikan wadah promosi perbuatan seperti sub-ordinasi, loyalitas, dan ketaatan kepada raja dan pemerintah serta membuat suara dalam

pemilihan kebijakan bagi warga Norwegia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki pengembangan konten diantaranya adalah moralisme dengan kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, pemahaman mengenai politik melalui pendidikan politik, pengetahuan mengenai organ-organ politik utama. Kemudian, isu-isu kekinian mengenai demokrasi, perdebatan isu melalui model kritism serta pemahaman mengenai hak-hak hukum dan kewajiban warga negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah memfasilitasi partisipasi politik, dan di sisi lain, meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan pendapat dan penilaian tentang isu-isu politik.

Selanjutnya, Lindsrom (2013: 20-27) memberikan gagasan mengenai pendidikan kewarganegaraan di Negara Swedia. Pendidikan kewarganegaraan menjadi jembatan untuk siswa memiliki kesempatan menjadi bagian kerja dalam kerangka praktik demokratik, yang dapat mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat di kemudian hari. Warga negara di negara Swedia merupakan anggota dari komunitas politik atau negara, yang memiliki hukum, sosial, dan hak moral, tugas serta tanggung jawab. Kewarganegaraan merupakan konsep politik dengan berbagai hak dan tanggung jawab dalam komunitas politik tertentu. Pendidikan kewarganegaraan memuat di dalamnya penjelasan mengenai hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara di Swedia. Pendidikan kewarganegaraan mengarahkan pada keterampilan untuk dapat saling menghormati sesama orang lain, memiliki kepedulian sosial, dan memiliki dasar pertimbangan untuk dapat mengambil tanggung jawab pribadi, dan memiliki kepercayaan dan harga diri. Subjek pendidikan kewarganegaraan yang dipelajari adalah informasi seputar kewarganegaraan dan sejarah. Hal ini didasarkan pada premis bahwa pemuda merupakan generasi penerus estafet nasib bangsa. Partisipasi dalam demokrasi, paling besar diminati dan dianjurkan dalam persekolahan. Selain itu, konten ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan kehidupan dan belajar serta berlatih untuk keterampilan yang baru. Kemudian, konten dalam pendidikan kewarganegaraan termasuk di dalamnya mengenai isu-isu identitas dan kesetaraan daripada dengan proses politik formal.

Mattei & Broeks (2016: 2-15) menyajikan mengenai isu kebijakan yang dihadapi demokrasi liberal di Eropa. Hal ini terkait dengan masyarakat multi-etnis dengan nilai-nilai moral dan agama serta etika yang berbeda pada masing-masing budaya. Disinilah peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam integrasi imigrasi melalui sekolah-sekolah di Belanda dan Inggris. Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk mengintegrasikan imigran kelompok sosial, menumbuhkan kesetiaan mereka terhadap negara yang mendorong untuk menjadi dan atau terlibat dalam politik yang demokratis. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan adalah menentukan apakah integrasi kedua negara bergerak menjauh dari konsep multikulturalisme dan bukan konvergen menuju kepada sikap asimililasi berdasarkan keamanan, dan memandang keberagaman sebagai tantangan untuk memiliki nilai-nilai liberal dan tetap mempertahankan identitas nasional. Analisis menunjukkan bahwa kedua negara mengalami politik yang serupa dan sosial ekonomi serta merekonstruksasi kebijakan integrasi mereka dalam 15 tahun terakhir. Inggris lebih memperlihatkan kewarganegaraan republikan, sementara integrasi Belanda kebijakan tetap dekat dengan kerangka multikulturalis dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam beberapa bidang. Pendidikan kewarganegaraan di negara Inggris lebih diarahkan pada materi mengenai moral dan perlahan kembali pada tradisi multikultural. Sedangkan, Pendidikan kewarganegaraan di Belanda konsisten pada pendidikan multikultural. Sekilas pendidikan kewarganegaraan dikedua negara nampak sama. Akan tetapi, setelah evaluasi substantif menjadi jelas bahwa di Inggris, lebih menunjukkan dorongan untuk mengasimilasi

murid non-barat, sedangkan di Belanda, kewajiban moral begitu terasa. Kebijakan integrasi Inggris dan Belanda telah lama dianggap sebagai tipe ideal multikulturalisme dan sering sebagai patokan untuk kebijakan belajar di Eropa.

Tobin (2010: 273-288) menjelaskan perbedaan mengenai pendidikan kewarganegaraan pasca-komunis Polandia dan Romania. Kerri menjelaskan pendidikan kewarganegaraan pada saat mengalami transformasi politik dan sosial memiliki nilai pengetahuan lebih rendah dari negara-negara yang stabil. Pendidikan di Polandia memiliki tema kewarganegaraan, mengenai partisipasi masyarakat, demokratis, dan kebebasan. Pada sekolah-sekolah baik di Polandia dan Romania pembelajaran mengarah pada keaktifan siswa. Dengan memprioritaskan keaktifan siswa di kelas-kelas (sekolah), maka daya pikir demokratis akan muncul dari tiap-tiap warga negara di kedua negara tersebut. Akan tetapi, pembelajaran di Polandia lebih bersifat mengadopsi nilai-nilai kewarganegaraan dari internasional dibanding di Romania yang lebih menjunjung tinggi nilai internalnya. Kedua negara memiliki standar kompetensi yang hampir sama, mulai dari pengetahuan kewarganegaraan, partisipasi warga negara, dan perilaku warga negara. Setelah pasca-komunis tersebut di Polandia pendidikan kewarganegaraan disebut sebagai pendidikan untuk warga negara demokrasi (EDCP), dan memiliki kerjasama dengan kementerian pendidikan di Polandia dan Universitas Ohio di USA. Polandia lebih memperlihatkan pendidikan kewarganegaraan dengan berbagai relasi dengan luar negeri.

Gardin (2016: 75-89) menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam membangun modal sosial di Finlandia dan Luksembur. Pendidikan kewarganegaraan di Luksembur lebih mengarah pada bagaimana pengaruh budaya politik terhadap masyarakat. Dengan kata lain, mendeteksi persamaan dan perbedaan dalam pengembangan warga di masyarakat Eropa modern. Penciptaan teknik *Lycee* di Luksembur, pendidikan kewarganegaraan mengarah pada kehidupan dan kewajiban moral menuju persatuan warga. Modal untuk bersatu menjadi orientasi pendidikan kewarganegaraan di era transisi ke dunia modern. Di Finlandia, pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada pendidikan demokratisasi yang membuka jalan menuju belajar seumur hidup dan pengembangan keterampilan, investasi, menghadapi daya saing internasional dan penyampaian budaya yang mengarah pada politisasi negara.

Dari beberapa temuan kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara tersebut semakin memperjelas dan memperkuat gagasan Galston bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di negara liberal merupakan upaya yang penting untuk membangun nilai-nilai demokrasi, karakter yang baik bagi warga negara, keterampilan berpartisipasi aktif dalam ranah publik, kepedulian sosial, kemandirian, tanggungjawab serta menumbuhkan kesetiaan terhadap negara. Rata-rata di setiap negara liberal menerapkan pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya untuk membangun warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter yang baik, kemampuan berpendapat dalam menanggapi isu-isu publik, dan yang paling utama yaitu menumbuhkan partisipasi politik.

## SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan di negara liberal masih menuai kontroversi. Beberapa kalangan masyarakat masih menganggap tidak penting. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan justru beranggapan akan bertentangan dengan konsepsi cara hidup yang berbeda diantara individu, keluarga dan masyarakat yang majemuk. Selain itu dianggap melanggar hati nurani dan kebebasan individu untuk tidak didoktrin melalui pendidikan kewarganegaraan, sehingga mengancam hak-hak asasi warga

negara. Galston menyetujui adanya pendidikan kewarganegaraan di negara liberal supaya anak-anak mereka nanti memiliki cara berpikir yang lebih rasional tanpa adanya doktrin dari orang tua maupun masyarakat. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan setidaknya dapat mengevaluasi bakat, karakter, sangat penting menumbuhkan watak untuk menghormati hak dan privasi, toleransi terhadap keberagaman, nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, dapat mengetahui urusan masyarakat maupun negara sehingga dapat mengevaluasi, membela kepentingan masyarakat serta mengkritik pemerintah secara *fair*. Pedagogi kewarganegaraan dapat memasukkan kebajikan partisipatif untuk mengakomodasi politik yang lebih ramah untuk berpartisipasi aktif dari pada kenyataan yang terjadi. Masalah yang terjadi pada pendidikan kewarganegaraan liberal yaitu adanya bentrokan antara isi pendidikan dan keinginan orang tua untuk meneruskan cara hidup mereka kepada anak-anak mereka, serta prinsip sama yang mengharuskan negara untuk memberikan kebebasan pribadi dan politik bagi orang dewasa sehingga tidak bisa untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan terhadap warga negaranya. Hal ini otomatis membatasi kebebasan hak individu yang harus diatur.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arthur & Davies. (2008). *Citizenship education volume 1 fundamental issues- the nature of citizenship education*. Sage Publications.
- \_\_\_\_\_. (2008). *The SAGE handbook of education for citizenship and democracy (civic education, social justice and critical race theory)*. Sage Publications.
- Bachmueller & Patrick. (1999). *Principles and practices of education for democratic citizenship international perspective and projects*. ERIC.
- Berge, E., B. (2006). Missed opportunities: the IEA's study of civic education and civic education in post-communist countries. *Comparative Education*, 42(4), 533-548. Diakses dari [https://www.jstor.org/stable/29727804?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/29727804?seq=1#metadata_info_tab_contents)
- Borhaug, K. (2010). Norwegian civic education - beyond formalism? L'education civique Norvegienne – au –dela du formalisme?. *Journal of Social Science Education*, 9(1), 66-67. Diakses dari: <http://www.jsse.org/index.php/jsse/article/download/503/500/>
- Çelik, R. (2016). Curriculum elements of a politically liberal education in a developing democracy. *Educational Philosophy and Theory*, 48(14), 1464–1474. doi:10.1080/00131857.2016.1160356
- Dania, P. (2015). Civic education as a collaborative dimension of social studies education in attainment of political ethics in Nigeria, 6(28), 48-50. Diakses dari: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1081208.pdf>
- Fernández, C., & Sundström, M. (2011). Citizenship education and liberalism: a state of the debate analysis 1990-2010. *Studies in Philosophy and Education*, 30(4), 363-384. doi:10.1007/s11217-011-9237-8
- Gainous, J., & Martens, A. M. (2016). Civic education: do liberals do it better?. *Journal of Political Ideologies*, 21(3), 261-279. doi:10.1080/13569317.2016.1205965
- Galston, W. A. (2004). Civic education and political participation. *Political Science and Politics*, 37(02), 263-266. doi:10.1017/s1049096504004202
- Gardin, M. (2016). *Building social capital through civic education in VET: a comparative study of Finlandia and Lexembourg (1960-1970)*. 3(1), 75-89. Diakses dari:

- publications.uni.lu/.../Nordic%20Journal%20of%20Educational%20History\_VET\_Fin.
- Giroux, Henry A. (2014). *Critical theory and rationality in citizenship education*. Boston University.
- Lindsrom, L. (2013). Citizenship education from a Swedish perspective. 3(2), 20-27. Diakses dari: <http://www.macrothink.org/journal/index.php/jse/article/view/3321/2901>
- Mattei, P., & Broeks, M. (2016). From multiculturalism to civic integration and integration policies in the Netherlands and England since the 2000s. 10(1), 2-15. Diakses dari: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468796816676845>
- Murray & Dirk. (2012). *Schools, curriculum and civic education for building democratic citizens*. Sense Publishers.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Civic education and competences for engaging citizens in democracies*. Sense Publishers.
- Rorty, A., O. (1998). *Philosophers on education historical perspectives*. London and New York: Routledge.
- Ruyter, D.J. de & Miedema, S. (eds.). (2011). *Moral education and development*. The Netherlands Sense Publishers.
- Strandbrink, P. (2017). *Civic education and liberal democracy*. Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Tobin, K. (2010). Civic education in emerging democracies: lessons from post-communist Poland and Romania. 9(3), 273-288. Diakses dari: [journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1475240910382996](https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1475240910382996)
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.